

GLOBALISASI: MENINDAS DAN MEMISKINKAN MASYARAKAT

Dheny Wiratmoko

Dosen Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Pacitan

E-mail: dheny.wiratmoko@yahoo.co.id

Abstract:

Along with the time development, the masterpiece of human civilization will be more visible. Constructive thoughts always colours the processes of the development. The development of information and technology will facilitate the access to the necessities of life. Geographical boundaries between countries, as if it was not able to recognize, as a result, there is often increasingly complex intersection between cultures. Globalization makes the social order of society change. The shift of an agrarian to an industrial society increasingly inevitable, consequently, capital factor extremely plays role. Capitalism grows everywhere, both in developed countries and in developing countries. Developed country and has a lot of capital will dominate the economic sector. As a result , for developing countries , of course, will depend on the help of other countries , as a result , the new style of economic imperialism and colonialism will emerge by itself . To deal with this, the development sector must be exactly run. The development must be felt by the whole societies.

Keywords:

Globalization, Development, Poverty.

Sejauh ini, dalam tuntutan era globalisasi yang semakin kompleks, bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang sangat pelik. Budaya konsumen dan konsumerisme menjadi trend hidup baru di masyarakat. Sejauh ini, kondisi yang demikian telah menimbulkan berbagai ketimpangan sebagai akibat akses yang tidak sempurna di masyarakat. Sejumlah fenomena yang terjadi di masyarakat memperlihatkan betapa pentingnya suatu strategi kebudayaan untuk sebuah bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia ini.

Proses pembentukan kebudayaan Indonesia berlangsung tidak melalui proses yang sentralistik. Beberapa wilayah dengan karakteristik kebudayaannya haruslah ditumbuhkan dan dikembangkan guna memungkinkan nilai-

nilai budaya antar wilayah masyarakat dapat dipadukan dengan menemukan titik singgung dengan nilai-nilai budaya global. Nilai-nilai budaya yang demikian, yang akan membentuk sistem budaya dalam menghadapi tantangan kebudayaan global.

Di dalam masyarakat Indonesia, telah terjadi pergeseran secara kontinu, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, yang menjadikan modal (uang) sebagai faktor penentu. Modal dan investasi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perlu adanya usaha antisipasi dalam menyikapi fenomena tersebut, yang dapat diterapkan secara nyata bagi kepentingan masyarakat kecil pada umumnya. Proses desentralisasi kebudayaan yang memberi tempat

pada wilayah-wilayah kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah di wilayah Indonesia, bukan saja akan menimbulkan kreativitas bangsa tetapi juga akan memiliki arti penting bagi ketahanan budaya dari suatu bangsa yang majemuk. Perubahan yang demikian jelas akan mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka jenis penelitian yang dipilih adalah kajian kepustakaan (*library research*), artinya data penelitian berasal dari sumber-sumber kepustakaan yang berupa buku, jurnal, dan sumber lain yang sesuai dengan tema bahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni berusaha mendeskripsikan secara jelas dan sistematis objek kajian yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis dan kemudian dihasilkan sebuah kesimpulan. Hal ini memungkinkan untuk mencari relevansi kedua konsep tersebut.

Penelitian ini bermaksud untuk memahami permasalahan yang terkait dengan objek kajian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Cara yang dilakukan yaitu dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks permasalahan secara alamiah. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi mengenai perkembangan globalisasi dan dampak yang diakibatkan di masyarakat. Dari analisis tersebut, akan dapat diketahui bahwa perkembangan globalisasi adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian, masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk menyongsong perkembangan globalisasi yang semakin tanpa batas. Dalam konteks ini, keuntungan dan kerugian dari perkembangan globalisasi harus mendapat perhatian yang lebih serius.

Sumber data atau informasi yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar adalah berupa data literatur yang digali dari beberapa sumber data. Data literatur yang didapatkan kecenderungannya tidak bersifat *nomotetik* (satu data satu makna), untuk itu, data-data tersebut perlu ditafsirkan agar mendekati kebenaran yang diharapkan.

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencatat dokumen (*content analysis*). Teknik ini berusaha untuk mencatat apa yang tersirat dan tersurat. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang tertulis. Dalam *content analysis*, keterpaduan antara objektivitas, sistematikasi, dan generalisasi menjadi penting. Untuk itu, teknik analisis datanya harus dilakukan dengan cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Globalisasi Semakin Nyata

Globalisasi secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses yang mendorong umat manusia untuk merubah cara hidup yang bersifat nasional ke arah cara hidup dengan wawasan global. Era globalisasi berarti suatu kurun waktu yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala serta masalah yang menuntut manusia untuk menggantikan pola-pola persepsi dan berfikir tertentu, yang mengarah pada pemahaman secara global.

Globalisasi yang berkembang dewasa ini, dipicu dan dipacu oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi yang diistilahkan dengan *Triple "T" Revolution* yaitu perkembangan kemajuan teknologi di sektor telekomunikasi atau informasi, transportasi, dan *trade* (liberalisasi perdagangan). Ketiga hal tersebut menjadi kekuatan pemicu dan pemacu globalisasi yang kita hadapi sekarang ini. (Zainul Ittihad Amin, 1999: 4.3).

Arus globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terbuka dan saling ketergantungan antar negara dan antar bangsa. Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia kini bukan saja saling terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang dicapainya, akan tetapi juga akan menimbulkan budaya saling ketergantungan, yaitu keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tententu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain. Parahnya, budaya ketergantungan tersebut kadangkala tidak bersifat timbal balik, artinya suatu negara tertentu selalu menjadi konsumen dari produk negara lain, dan hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Kalaupun itu berlangsung terus menerus, maka tentunya akan menyebabkan permasalahan yang kompleks pula. Karena saling

ketergantungan ini, semua negara akan menjadi terbuka terhadap pengaruh dari negara lain. Budaya ketergantungan akan mengakibatkan keterbelakangan, dan begitu pula sebaliknya.

Globalisasi merupakan proses transformasi berbagai dimensi kehidupan sosial manusia yang mengarah pada suatu pusat budaya kosmopolitan. Arus globalisasi mendesakan *uniformitas* secara universal. Secara perlahan, namun pasti, proses universal ini akan mengikis batas-batas identitas negara dan individu secara hampir bersamaan melalui liberalisasi ekonomi dan demokratisasi di tingkat global maupun nasional (Grendi Hendrastomo, 2007: 94-95).

Globalisasi yang sedang merobek-robek kehidupan manusia berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga menembus batas-batas tradisional (geografi) suatu negara. Dengan demikian, tidak suatu negarapun yang dapat membendungnya (Zainul Ittihad Amin, 1999: 4.18). Kecenderungan yang demikian jika tidak diantisipasi dapat merusak kepribadian masyarakat.

Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah, dan tantangan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan hidup, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamatan kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global (khususnya) ekonomi, berupa perekonomian bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan Asia-Afrika, bangsa Indonesia harus siap mental (Nursid Sumaattmaja, 1999: 2.10).

Kondisi yang demikian ini harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Perlu juga memikirkan sebuah sistem yang mewadahi berbagai pengaruh-pengaruh sosial dalam kehidupan masyarakat, misalnya di sektor pendidikan, ekonomi, politik, budaya dan yang lainnya. Meningkatnya mutu sumber daya manusia akan tercermin dalam usahanya untuk mengembangkan diri dan berkarya untuk bangsanya.

Globalisasi menuntut percepatan, baik informasi maupun komunikasi yang dapat dijalankan selaras dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Kompleksitas ini harus didukung dengan prasyarat yang meliputi sarana dan prasarana yang secara integral dapat menyatu dan sejalan dengan perkembangan zaman, mi-

salnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Budaya Konsumen di Indonesia

Pengalaman sejarah ekonomi Indonesia memberi kemungkinan terbuka untuk studi sejarah mikro, karena begitu banyaknya variasi kedaerahan. Variasi kedaerahan ini disebabkan oleh perbedaan-perbedaan ekologi, struktur sosial, pengaruh luar, dan budaya setempat. Di setiap daerah pun tidak selalu ada keseragaman tingkat perkembangan ekonomi. Ekonomi kita barangkali plural, baik dalam tingkat perkembangan, maupun kelembagaan, sehingga sukar untuk mengadakan generalisasi secara nasional dan makro (Kuntowijoyo, 2003: 92).

Budaya global yang merajai pola konsumsi materi, kini telah merambah seantero dunia, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari pola-pola budaya konsumtif global. Pemenuhan konsumsi yang diwujudkan dalam nilai-nilai material menjadi salah satu indikator muncul dan berkembangnya globalisasi di Indonesia. Bersamaan dengan kapitalisme, maka munculah cara hidup baru, atau lebih tepatnya, kapitalisme lahir bersama dengan cara hidup yang baru yaitu yang bersifat rasional dan kalkulatif (Peter Beilharz, 2005: 366).

Fenomena kehidupan masyarakat yang demikian sudah dalam taraf yang sangat mengkhawatirkan. Pengutamaan nilai konsumsi-materi mengancam nilai yang lebih utama yaitu humanisme dan spiritualisme. Menurut Weber, akumulasi modal ini memungkinkan terjadinya transisi dari feodalisme menuju kapitalisme. Logika pengejaran kekayaan duniawi demi Tuhan itu menjadi boomerang bagi dirinya sendiri. Jika agama membantu lahirnya kapitalisme, sedangkan kapitalisme segera mulai menghancurkan agama. Implikasinya sangat jelas, bahwa rasionalitas menjadi irasionalitas. Rasionalitas kapitalis menciptakan kosmos yang cukup diri dan berdiri sendiri, sampai batas di mana warganya lantas melupakan kemajemukan rasionalitas (Peter Beilharz, 2005: 366).

Karena nilai global menjadi tolak ukur dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat pun menjadi larut di dalamnya. Dengan demikian, yang terjadi adalah adanya upaya untuk memperlihatkan perbedaan status sosial dalam

masyarakat, yang kalaupun tidak dicegah sedini mungkin dapat saja menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Apakah pola pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang tentunya begitu kompleks ini?. Sudah saatnya, ada sebuah rencana pembangunan yang sangat matang yang tentunya memikirkan kepentingan pemerintah, swasta, dan juga tidak boleh dilupakan kepentingan masyarakat kecil.

Problem sosial kemanusian di Indonesia pada dasarnya masih terkait dengan problem kemiskinan dan konflik. Kemiskinan secara nyata memberi dampak yang nyata terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan dapat menyeimbangkan pembangunan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Deferensiasi dalam masyarakat telah melahirkan berbagai bentuk ketimpangan kekuasaan antar kelompok, baik dari parameter agama, etnis, kelas sosial, maupun lokalitas (Kementerian Ristek RI dan FIB UGM, 2003: 32).

Perbedaan antara ekonomi petani dengan ekonomi kapitalis sangat mudah diidentifikasi. Dalam ekonomi kapitalis, tanah dan kerja merupakan variabel atau faktor yang oleh penguasa dikombinasikan untuk memperoleh perolehan yang maksimum dari kapital, dan dianggap sebagai faktor yang tetap, sedangkan dalam ekonomi petani, kerjalah yang merupakan elemen yang tetap, dan menentukan perubahan dalam volume dari modal dan tanah. Ekonomi kapitalis berdasarkan pada modal, ekonomi petani berdasarkan pada kerja (Kuntowijoyo, 2003: 96).

Kemiskinan Di Indonesia

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang masih dapat dirasakan dampaknya. Bahkan krisis ekonomi tersebut sudah mulai berkembang menjadi krisis multidimensional yang parah. Krisis tersebut telah melahirkan dampak terhadap meluasnya gejala kemiskinan. Perluasan kemiskinan sudah melanda di seluruh pelosok Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin mengindikasikan bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjadi ketidakberdayaan (*powerless*) untuk menghadapi perubahan.

Masalah kemiskinan (*poverty*) dan masalah sosial, merupakan permasalahan pelik, yang tidak mudah untuk mencari solusinya. Upaya penanggulangan yang dilakukan cenderung hanya melihat persoalan kemiskinan pada tataran gejala-gejala yang tampak dari luar. Akibatnya, timbul dampak yang tidak menguntungkan, di antaranya adalah munculnya ketergantungan pada bantuan pihak luar, tumbuhnya benih-benih fragmentasi sosial, serta melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat. Lemahnya modal sosial dan pudarnya etika moral dalam kehidupan masyarakat pada gilirannya akan mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian dalam menyelesaikan persoalan bersama.

Definisi kemiskinan menurut Sulistiyanı ialah, bilamana masyarakat berada dalam satu kondisi yang serba terbatas, baik pada aksesibilitas terhadap faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Hesti Rinandari, 2006: 157). Sedangkan definisi lain tentang kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Asep Saefudin, Dkk., 2003: 4). Karena standar hidup layak manusia itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal. Kemiskinan tidak bisa lagi dipahami hanya sekedar kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan material dasar, akan tetapi kemiskinan adalah sebuah persoalan yang bersifat multidimensional.

Lebih lanjut Sulistiyanı menjelaskan, apabila dilihat dari penyebabnya, ada tiga dimensi kemiskinan yaitu: 1) kemiskinan natural adalah suatu kondisi keterbatasan secara alamiah seperti kondisi alam yang tidak menguntungkan, sehingga membatasi usaha suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; 2) kemiskinan kultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi oleh suatu komunitas disebabkan oleh faktor budaya; 3) Kemiskinan stuktural adalah kemiskinan yang melanda suatu komunitas karena terjebak oleh struktur yang dibangun oleh sekelompok orang yang mengambil keuntungan

dari struktur tersebut (Hesti Rinandari, 2006: 161).

Sebagai proses pemberdayaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya benar-benar mengembangkan keterlibatan masyarakat yang menjadi lokasi sasaran. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk membangun kemandirian dan partisipasi masyarakat.

Dimensi Pembangunan Masyarakat

Istilah pembangunan atau (*development*) menurut Misra mempunyai pengertian yaitu upaya yang sadar dan melembaga untuk mewujudkan keinginan yang baik. Sebagai upaya yang sadar dan melembaga, pembangunan tidak boleh tidak, akan bermuatan nilai, dalam arti menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat (Moeljarto Tjokrowinoto, 2002: 1). Senada dengan pendapat Misra, Saul M. Katz mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, yang dipandang lebih bernilai oleh negara atau bangsa tersebut (Moeljarto Tjokrowinoto, 1995: 31).

Dalam perjalannya, konsep pembangunan mengalami pergeseran paradigma seiring dengan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang sekiranya diharapkan dapat menghasilkan sebuah perubahan yang positif, kadangkala menjadi sebaliknya, yaitu terkait dengan dampak yang diakibatkannya. Paradigma pembangunan yang berkembang di Indonesia kadang masih dipengaruhi oleh diskursus pembangunan negara barat. Akibatnya, masyarakat seakan belum terlalu siap untuk menerimanya.

Pembangunan akan diragukan keberhasilannya bilamana tidak mampu menjawab persoalan-persoalan seperti meningkatnya jumlah pengangguran, ketidakmerataan dan kesenjangan pendapatan, dan meningkatnya kemiskinan absolut. Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, namun di sisi lain, kemiskinan juga meningkat. Distribusi hasil-hasil pembangunan melalui mekanisme *trickle down effect* tidak dapat berjalan karena perembesan keuntungan ke lapisan bawah tidak terjadi seperti yang diharapkan.

Selain itu, pembangunan yang berorientasi pertumbuhan cenderung direncanakan secara terpusat (*top down*), sehingga sering tidak sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menjadi satu-satunya agen pembangunan, sedangkan masyarakat hanya menjadi objek pembangunan saja. Menurut Raharjo, pembangunan yang bersifat de-edukasi tersebut menumbuhkan sikap ketergantungan, melemahkan daya kreatifitas, menumpulkan sensitivitas dan sikap kritis, serta menimbulkan pola patrimonial dan paternalis pada masyarakat (Hagul, 1985: 81-82).

Paradigma yang demikian hendaknya dapat diubah, yaitu dengan menerapkan strategi pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat (*bottom-up*), sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara utuh dalam setiap prosesnya. Peran pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat atau memberi ruang yang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan seluruh potensinya.

Perilaku Masyarakat Perkotaan

Setiap sektor kehidupan masyarakat mempunyai beragam aktivitas yang kompleks dan dinamis. Pembangunan dilakukan di mana-mana, baik di sektor fisik maupun non fisik, tetapi semua itu tentu harus tetap memperhatikan akar budaya masyarakatnya. Dinamika masyarakat tersebut kadang berjalan cepat, kadang sebaliknya, berjalan dengan sangat lambat. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, di antaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan faktor yang lainnya. Faktor-faktor tersebut menjadi saling berhubungan dan saling mendukung, sehingga, permasalahan yang muncul pun menjadi beragam.

Problem kemiskinan di perkotaan terasa jauh lebih kompleks persoalannya jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Problem di perkotaan yang secara sosial ekonomi bersifat mengurai (*differentiated*) tentu saja akan memiliki akar yang lebih beragam dan tentu saja akan memberi implikasi yang jauh lebih luas dan beragam jika problem kemiskinan semakin menjadi persoalan yang akut. Di tingkat perkotaan, problem kemiskinan ikut memberi andil pada rendahnya kualitas

sumber daya manusia Indonesia yang semakin terindustrialisasikan. Akibat logis dari hal ini, kita tidak memiliki sumber daya manusia yang handal, kecuali menjadi tenaga buruh untuk sektor industri (Kementerian Ristek RI dan FIB UGM, 2003: 31).

Ketidaksiapan masyarakat perkotaan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan yang ditawarkan oleh pembangunan turut menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Seiring dengan kemajuan industri yang cukup pesat, maka tuntutan tingginya jenjang pendidikan, keahlian, dan juga keterampilan dari masyarakat turut menjadi perhatian. Akibatnya, apabila masyarakat tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, tentu banyak masyarakat yang akan kalah bersaing, dan tersingkirkan.

Sumber daya masyarakat yang rendah akan menciptakan permasalahan terkait dengan aksesibilitas, misalnya untuk sekedar mendapatkan suatu pekerjaan. Tingkat persaingan dalam mendapatkan sebuah pekerjaan di kota semakin ketat. Apalagi selama ini banyak masyarakat yang ada di perkotaan merupakan hasil migrasi penduduk dari pedesaan, yang kebanyakan hanya berpendidikan rendah, akibatnya sesampainya di kota, tentu harus berjuang dengan keras untuk sekedar memenuhi penghasilan untuk keperluan hidup.

Tidak mudah untuk hidup di perkotaan dengan tingkat persaingan kerja dan sikap individual masyarakatnya. Akibatnya, sering terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kaya akan semakin kaya dan berkuasa, dan sebaliknya yang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Akibat yang lebih parah dari kondisi ini yaitu sering terjadi tindak kriminalitas yang melanda masyarakat. Kalau hal tersebut terus berlanjut maka kenyamanan masyarakat pun akan terganggu.

Perilaku Masyarakat Pedesaan

Kehidupan di pedesaan secara sosial ekonomi masih bersifat menyatu (*embeded*), memiliki problem yang kurang lebih bermuara pada sektor pertanian dan kenelayanan, yang merupakan karakter pedesaan. Problem kemiskinan di pedesaan memiliki kecenderungan pada lemahnya kapasitas kelembagaan, sehingga program-program yang selama ini diterapkan

sering kali mengabaikan faktor tersebut (karena cenderung *top down*). Akibatnya, kegalilan demi kegagalan program pengentasan kemiskinan cenderung membuat kejemuhan di tingkat pedesaan yang kemudian menghasilkan keengganan untuk berubah (Kementerian Ristek RI dan FIB UGM, 2003: 31).

Kondisi kesenjangan sosial ini sangat terkait dengan kesenjangan politik dan budaya. Selama ini masyarakat pedesaan sangat lemah aksesnya terhadap lembaga-lembaga publik yang umumnya berada di perkotaan. Lemahnya akses ini membuat suara dan aspirasi mereka tidak didengar dalam derap langkah pembangunan. Orang desa mempunyai banyak keterbatasan dalam memperoleh informasi-informasi pembangunan. Begitu pula dengan kelembagaan yang ada di desa belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mendorong suatu desa lebih diperhatikan oleh para pemegang kebijakan pemerintah (Abdul Rozaki, 2006: 7).

Pembangunan industri dan pertanian sebetulnya merupakan usaha untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang, yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri masyarakat dengan didukung sektor pertanian yang tangguh (Indah Sri Pinasti, 2007: 22). Usaha tersebut pada dasarnya harus mempertimbangkan pembangunan sarana dan prasarana yang seimbang antara desa dan kota. Selama ini yang terjadi adalah, pembangunan di kota semakin merajalela, yang mengakibatkan banyak terjadi arus migrasi penduduk, sedangkan kalau kita lihat pembangunan di desa sangat bertolak belakang. Sarana dan prasarana sangat minim, banyak terjadi pengangguran, dan ke sejahteraan penduduknya kurang terjamin. Dimensi kerakyatan terpinggirkan oleh kepentingan pragmatis.

Dari realita di atas, tentu akan muncul beberapa pertanyaan yang mungkin susah untuk mencari jawabanya, di antaranya adalah dapatkah bentuk-bentuk kultural dideduksikan dari, atau ditafsirkan berdasarkan ekonomi? Benarkah ekonomi merupakan basis masyarakat, sementara segala hal lainnya hanya sekedar pelengkap? Tentu hal tersebut tidak akan bisa diterima oleh pandangan masyarakat pedesaan.

Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Pembangunan fisik, seperti pembangunan pusat perbelanjaan, pembangunan gedung perkantoran, pembangunan taman kota, pelebaran jalan dan sebagainya merupakan sebagian dari indikasi kemajuan dari suatu daerah. Di sisi lain, pendirian pusat perbelanjaan dan pembangunan fisik yang lainnya itu merupakan salah satu dampak dari era globalisasi itu sendiri, karena banyak orang menilai, kesuksesan pembangunan itu yang menjadi tolok ukur adalah pembangunan fisik. Tidak terkecuali pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, tentu juga sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang semakin maju ini.

Pembangunan pusat perbelanjaan di berbagai kota besar semakin lama semakin menjamur. Setiap sudut kota telah berdiri pusat-pusat perbelanjaan yang menawarkan berbagai aneka produk konsumsi. Yang menjadi masalah adalah pembangunan pusat-pusat perbelanjaan tersebut seakan-akan tidak memperhatikan kajian ekonomi, sosial, dan budaya, serta kompleksitas kehidupan masyarakat yang lainnya.

Pembangunan pusat perbelanjaan kalau tidak dianalisa dampaknya secara luas tentu akan memunculkan permasalahan tersendiri. Kesemerawutan lalu lintas, terganggunya sistem analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kesenjangan dan diskriminasi sosial, munculnya pencopet, preman, dan yang lainnya, tentu harus tetap menjadi perhatian. Di sisi yang lainnya, pembangunan pusat perbelanjaan dan sebagainya itu tentu akan mempengaruhi tata ruang wilayah.

Globalisasi membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat. Globalisasi juga membawa dampak yang anti rakyat kecil bagi masyarakat Indonesia. Di sektor budaya pun telah terjadi pergeseran. *Image* Indonesia sebagai negara yang ramah, semakin tergusur oleh budaya-budaya asing. Dengan demikian, perilaku yang tidak sesuai dengan budaya setempat menjadi berkembang. Hal itu tentu akan menggangu kelestarian budaya setempat, karena pada dasarnya masyarakat percaya bahwa kebudayaan bangsa Indonesia yang masih megnanut tradisi timur adalah kebudayaan yang tinggi. Sangat tepat apa yang diungkapkan oleh William A. Haviland, yaitu di antara ber-

bagai unsur dalam suatu kebudayaan, ada yang merupakan inti atau *cultural core*, yaitu berupa unsur-unsur kebudayaan tertentu yang menentukan berbagai bentuk kehidupan suatu masyarakat (Hari Poerwanto, 2000: 76).

Pembangunan pusat perbelanjaan tersebut tentunya juga harus memikirkan kesiapan konsumen lokal, sebab ada indikasi bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya siap dengan budaya konsumtif yang ditawarkan oleh pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Pendirian pusat-pusat perbelanjaan tersebut juga akan menggusur keberadaan pasar-pasar tradisional, dan pedagang kecil yang bermodal kecil. Dengan demikian, semakin lama pedagang yang bermodal kecil tersebut akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan pedagang yang bermodal besar.

Terancamnya Pasar Tradisional

Masyarakat pedesaan di Jawa biasanya digambarkan sebagai tempat yang harmonis, dengan sifat saling menolong dan hubungan yang harmonis antar anggotanya (Soegijanto Padmo, 2000: 159). Selanjutnya Geertz menambahkan dengan sebuah penekanan akan pentingnya pembedaan kultur dengan struktur sosial; dan secara khusus membahas pula paradigma kulturalnya. Faktor ekologi, ekonomi, sosial, dan kultural berperan dalam perubahan tersebut (Hari Poerwanto, 2000: 66).

Struktur sosial dalam bingkai budaya, khususnya di pedesaan identik dengan keberadaan masyarakat yang masih sederhana. Prinsip hidup gotong-royong dan ikatan kekerabatan sosial masih sangat terasa. Sektor agraris menjadi tumpuan dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, kehidupan tradisional masih sangat kental dirasakan dalam keseharian masyarakatnya.

Dalam sektor ekonomi juga masih dipengaruhi oleh sisi-sisi tradisional. Aktivitas ekonomi dilakukan di rumah dan juga di pasar-pasar tradisional. Dengan demikian, keberadaan pasar-pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat penting. Perubahan-perubahan yang terjadi di desa dan di masyarakat petani biasanya menyangkut perubahan ekonomi *subsistence* ke ekonomi *exchange* (Kuntowijoyo, 2003: 76).

Masyarakat desa menjadikan pasar tradisional sebagai tempat untuk mengadakan transaksi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan

sehari-hari. Dengan demikian, eksistensi pasar tradisional sejak dahulu hingga sekarang masih tetap terjaga. Dalam transaksi ekonomi, sisisi kekerabatan kadang-kadang masih berlaku, sehingga orientasi dari transaksi ekonomi bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tetapi juga mencari saudara. Hal itu identik dengan falsafah Jawa "tuno satak bathi sanak" yang artinya rugi uang, tetapi dapat saudara baru.

Akan tetapi tidak semua pasar-pasar tradisional tersebut dapat eksis keberadaannya. Ancaman globalisasi begitu terasa dengan berdirinya pusat-pusat perbelanjaan yang semakin menjamur. Pola konsumsi masyarakat pun, yang semula membeli di pasar-pasar tradisional, lama-kelamaan akan bergeser ke pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Mungkin hanya pasar-pasar tradisional yang besar dan sudah terkenal yang masih akan tetap eksis. Tetapi bisa jadi tidak demikian dengan pasar-pasar tradisional yang kecil dan belum terkenal. Pasar-pasar ini bisa saja ditinggal pembeli dan penjualnya, sehingga lama-kelamaan pasar tersebut tentu akan tutup.

Rupanya Teori Dualisme Ekonomi Boeke yang mangatakan bahwa di negara-negara berkembang terdapat dua sistem ekonomi yaitu ekonomi modern (internasional) dan ekonomi tradisional (lokal), yang menurut Boeke akan berjalan beriringan atau hidup berdampingan secara permanen, menjadi semakin lemah. Sistem ekonomi modern dengan sistem kapitalismenya akan selalu membawa ancaman pada sistem ekonomi tradisional. Akibatnya pasar-pasar tradisional semakin lama akan semakin tergeser oleh keberadaan pusat-pusat perbelanjaan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang memunculkan dampak perubahan yang begitu kompleksnya. Hampir seluruh lapisan masyarakat turut marasakan dampak globalisasi tersebut. Di antara sektor kehidupan yang ada, yang paling terasa adalah pada sektor ekonomi. Kesiapan dari berbagai hal menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera direalisasikan.

Globalisasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kapitalisme yang sudah demikian dirasakan masyarakat. Kapitalisme menjadikan masyarakat berorientasi kepada pencapaian keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dampaknya, yang kaya akan semakin berkuasa dan sebaliknya yang miskin akan semakin tertindas. Kapitalisme juga menjadikan masyarakat terjangkit budaya konsumerisme yang akut. Padahal kenyataannya selama ini, belum semua masyarakat merasa siap dengan perubahan budaya tersebut.

Fenomena yang demikian harus menjadi perhatian yang serius. Untuk menanggulangi dampak globalisasi yang sudah semakin berkembang pesat ini, maka modal sosial dari masyarakatnya harus dimaksimalkan. Budaya lokal yang selama ini dipegang oleh masyarakat harus dapat menjadi benteng terhadap arus globalisasi yang semakin merajalela tersebut.

Saran

Berdasarkan pada uraian artikel tersebut, hendaknya ada perspektif yang lebih luas dalam memahami makna dari globalisasi. Tidak bisa kita pungkiri, bahwa globalisasi bisa menjadi peluang, bisa menjadi tantangan, bahkan bisa menjadi ancaman. Dalam konteks ini, globalisasi merupakan era di mana manusia dihadapkan pada sebuah pilihan untuk memaknai hidup dan sekaligus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Ketika kita bisa memaknai globalisasi dengan positif, maka globalisasi bisa menjadi momen untuk menunjukkan kreativitas dan keunggulan diri sebagai bagian dari masyarakat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak bisa mempersiapkan diri pada era globalisasi, maka kita akan menjadi objek penderita dari era globalisasi. Peningkatan dan pengembangan kapasitas diri menjadi sebuah kebutuhan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan keilmuan dan pengetahuan secara profesional dengan tetap berpijak pada etika dan norma-norma yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozaki. (2006). "Gerbang Dayaku; Proyek Pembangunan Desa Sang Bupati di Kutai Kartanegara", dalam buku *Pembangunan yang Meminggirkan Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Asep Saefudin, Dkk. (2003). *Menuju Masyarakat Mandiri; Pengembangan Model Keterjaminan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Grendi Hendrastomo. (2007). "Nasionalisme vs Globalisasi; Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern". *Dimensia*. Volume 1 Nomor 1, Maret. Yogyakarta: FISE UNY. Hagul, Peter (ed). (1985). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Hari Poerwanto. (2000). *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hesti Rinandari. (2006). "Kemiskinan dalam Keberlimpahan", dalam buku *Pembangunan yang Meminggirkan Desa*. Yogyakarta: IRE
- Indah Sri Pinasti, V. (2007). "Pengaruh Pembangunan Terminal Giwangan Terhadap Proses Perubahan Sosial". *Dimensia*. Volume 1 Nomor 2, September. Yogyakarta: FISE UNY.
- Kementerian Ristek RI dan FIB UGM. (2003). "Arah Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan", dalam *Pembangunan Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan di Indonesia (Suatu Pemetaan Awal)*. Yogyakarta: UGM.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moeljarto Tjokrowinoto. (1995). *Politik Pembangunan; Sebuah Analisis, Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- (2002). *Pembangunan; Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursid Sumaatmaja. (1999). "Perspektif Global dari Visi Geografi, Sejarah, dan Ekonomi", dalam buku *Perspektif Global*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Peter Beilharz. (2005). *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*. Ab. Sigit Jatmiko. *Teori-Teori Sosial; Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegijanto Padmo. 2000. "Perkembangan Kesempatan Kerja Nonpertanian di Karesidenan Cirebon 1830-1930", dalam buku *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Zainul Ittihad Amin. (1999). *Pendidikan Kewiraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.